

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN **MASYARAKAT (SKM)**



TAHUN 2024

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO

0821-8040-0501



DAFTAR ISI

DAFT	AR ISI	ii
SURA	AT PERNYATAAN KEBENARAN DATA SKMii	i
BAB I		1
PEND	AHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
BAB I	l	3
PENG	GUMPULAN DATA SKM	3
2.1	Pelaksana SKM	3
2.2	Metode Pengumpulan Data	3
2.3	Lokasi Pengumpulan Data	4
2.4	Waktu Pelaksanaan SKM	4
2.5	Penentuan Jumlah Responden	4
BAB I	II	5
HASIL	PENGOLAHAN DATA SKM	5
3.1	Jumlah Responden SKM	5
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	5
BAB I	V	7
ANAL	ISIS HASIL SKM	7
4.1	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan per Unsur Layanan Pelayanan	7
	Rencana Tindak Lanjut Tren Nilai SKM	
BAB \	/ 1	0
KESIN	MPULAN1	0
LAMP	PIRAN 1	1
1.	Kuesioner1	1
2.	Hasil Olah Data SKM1	4
3.	Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM 1	5
4.	Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM pada Periode Sebelumnya1	1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
- 5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM;
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
- 7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada Loka POM di Kabupaten Bungo dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner https://bit.ly/YanblikLokaBungo yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu:

- 1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan :** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan https://bit.ly/YanblikLokaBungo pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan survey pada 4 wilayah kerja yang menerima pelayanan publik, yang diisi secara online oleh responden dengan tautan https://bit.ly/YanblikLokaBungo pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik pertahunan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan pelaksanaan		
	a. Pengumpulan data jenis	Minggu III Februari s.d. Minggu I Maret	
	dan pengguna layanan	2024	
	b. Penetapan target	Minggu II s.d. III Maret 2024	
	responden survei dan		
	penyiapan tautan survei		
2.	Pelaksanaan survei oleh UPP	1 April s.d. 30 Juni 2024	
		*diperpanjang hingga 12 Juli 2024	
3.	Pengolahan survei	Minggu I April s.d. Minggu IV Juli 2024*	
4.	Pelaporan survei oleh UPP	Minggu V Juli s.d. Minggu III Agustus	
		2024	

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Loka POM di Kabupaten Bungo Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut jumlah populasi dan sampel Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	1	1
2	Pengujian Obat dan Makanan	1	1
3	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	23	23
	Jumlah	25	25

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	6	24%
		Perempuan	19	76%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	7	28%
		DI/D2/D3	0	0
		D4/S1	16	64%
		S2/Profesi/S3	2	8%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	11	44%
		Pegawai Swasta	2	8%
		Wiraswasta	6	24%
		Pelajar/Mahasiswa	2	8%
		Lainnya	4	16%
4	Usia	≤ 25 Tahun	1	4%
		26 – 30 Tahun	3	12%
		31 – 35 Tahun	7	28%
		36 – 40 Tahun	2	8%
		≥ 41 Tahun	12	48%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Nilai SKM per jenis layanan

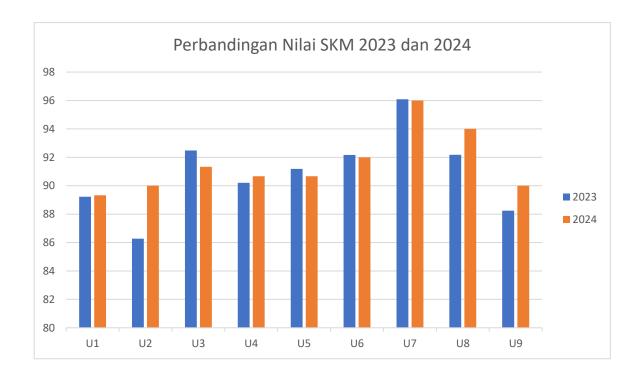
Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengujian Obat dan Makanan	83,33	100	94,44	83,33	83,33	83,33	100	100	83,33	90,12
Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	89,13	89,13	90,82	90,58	90,58	92,03	95,65	93,48	89,86	91,25

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

	Unsur Pelayanan	2023	2024	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	89,22	89.33	0,11
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86,27	90	3,73
U3	Waktu Penyelesaian	92,48	91,33	1,15
U4	Biaya/Tarif	90,2	90,67	0,47
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,18	90,67	0,51
U6	Kompetensi Pelaksana	92,16	92	0,16
U7	Perilaku Pelaksana	96,08	96	0,08
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,18	94	1,82
U9	Sarana dan Prasarana	88,24	90	1,76
	Nilai SKM Unit Layanan	90,89	91,65	

Keterangan:

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00) Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30) Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60) Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)



BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 89,33. Selanjutnya Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang mendapatkan nilai 90 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sarana dan Prasarana termasuk tiga unsur terendah.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 96, dari unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan mendapatkan 94, dan Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 92.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- a) "Dipertahanan dan ditingkatkan kembali".
- b) "Mohon pendampingan ke sarana yang langsung di rumah
- c) "Pelayanan bagus dan sangat memuaskan".
- d) "Pelayanan sangat baik, lebih di tingkatkan lagi untuk pemberitahuan ke masyarakat dan pelaku usaha UMK".
- e) "Sesuai lebih enak dalam penyampaian"
- f) "Bagus, Sopan, Mudah dan tidak ribet"
- g) "Baik, layanan mobil keliling terus dilaksanakan"
- h) "Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan keliling ke pusat kumpul masyarakat sudah baik"

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pelayanan yang diberikan petugas sudah baik, tapi persyaratan untuk layanan perlu dijelaskan lebih baik agar pelaku usaha tidak merasa ribet dalam memenuhi persyaratan
- 2) Pelayanan Layanan Publik Aktif Bergerak BPOM Sapa Masyarakat (LAPAK POM SAPAKAT) yaitu layanan publikasi dan pendampingan UMKM menggunakan mobil laboratorium dipusat keramaian dan lokasi pelaku usaha.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal di TW III dan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan ditahun 2025 pada triwulan I, Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline (DD-MM-YY)	PIC
1	Pengujian Obat dan Makanan	Persyaratan	Pelaku Usaha merasa persyaratan dari registrasi di Badan POM terlalu banyak dan sulit dipenuhi, padahal pelaku usaha belum	Membantu pelaku usaha dan membuatkan template untuk persyaratan pemberkasan registrasi pangan olahan	Agustus- Desember	Infokom
			memahmi persyaratan dengan tepat sehingga sudah berpikir sulit terlebih dulu.	Memberikan edukasi kepada konsumen dipelayanan bahwa persyaratan izin edar tidak sulit karena adanya pendampingan	Agustus- Desember	Infokom
				Membuat postingan media sosial terkait Mudahnya pengurusan izin edar	Agustus- Desember	Infokom
		Biaya/Tarif		Mengedukasi ke masyarakat bahwa UMKM yang mengurus izin edar akan diberikan diskon 50% (Offline/Medsos)	Agustus- Desember	Infokom
		Sarana dan Prasarana	Sarana prasarana yang masih terbatas sehingga belum memenuhi standar	Menambah gedung yang disewa sehingga dapat melengjkapi kekurangan ruang pelayanan sesuai standarnya.	Agustus	Infokom
2	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Konsumen belum mengetahui mekanisme dan prosedure pelayanan.	Membuat dan memajang standar pelayanan dan SOP pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan	Agustus - Desember	Infokom

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak ada aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Loka POM di Kabupaten Bungo dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 pada Loka POM di Kabupaten Bungo .

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evalusai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, dapat disimpulkan:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Bungo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,56. Nilai SKM Loka POM di Kabupaten Bungo menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024.
- 2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, serta Sarana dan Prasarana.
- 3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dan Kompetensi Pelaksana

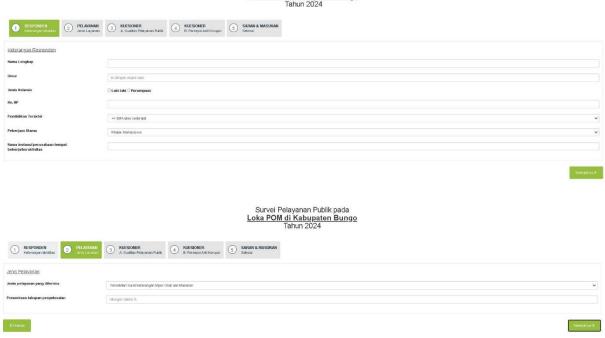
Bungo, 17 Juli 2024 Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo,

Pernanda Sapryanoki, S. Farm., Apt NIP. 19890401 201212 1 001

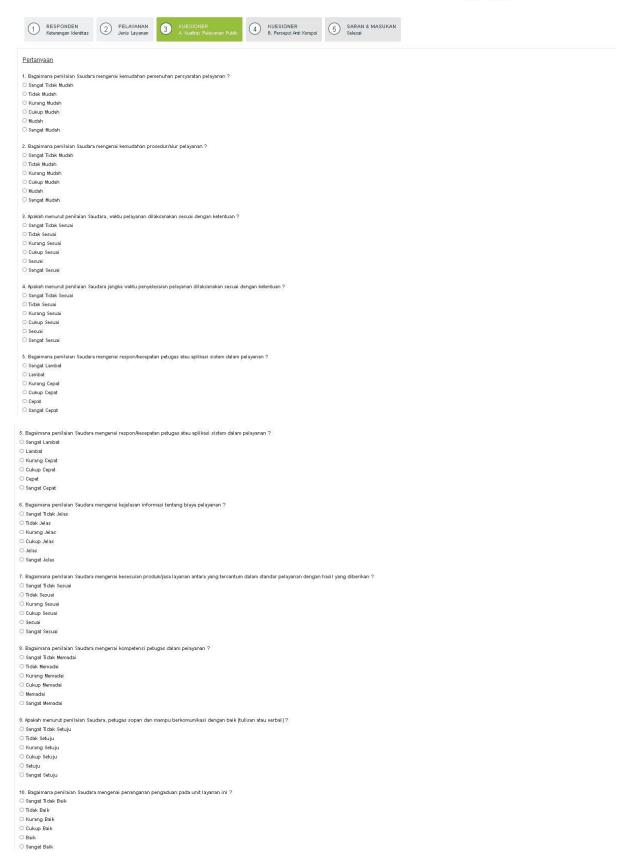
LAMPIRAN

1. Kuesioner

Survei Pelayanan Publik pada <u>Loka POM di Kabupaten Bungo</u> Tahun 2024



Survei Pelayanan Publik pada Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2024



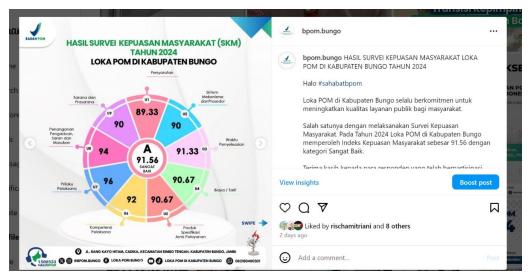
	Saudara mengenai ke	tersediaan sarana prasarana pe	ndukung pemberian pelaya	nan publik pada unit layanan	ini ?
 Sangat Tidak Lengkap Tidak Lengkap 					
Kurang Lengkap					
Cukup Lengkap					
O Lengkap					
Sangat Lengkap					
Sa = 50 8 /					
	aian saudara, persya	ratan pelayanan yang diinforma	isikan sesuai dengan yang	ditetapkan unit layanan ini ?	
Sangat Tidak Sesuai					
O Tidak Sesuai					
Kurang Sesuai Cukup Sesuai					
O Sesuai					
O Sangat Sesuai					
S					
	aian saudara, Inform	asi. Pelayanan pada unit layanar	n ini telah tersedia melalui i	media elektronik maupun non	elektronik ?
C Sangat Tidak Setuju					
O Tidak Setuju					
Kurang Setuju					
C Cukup Setuju Setuju					
Sangat Setuju					
Think challed and he					
	aian saudara, <mark>tarif/bi</mark>	aya pelayanan yang dibayarkan	pada unit layanan ini sesu	ai dengan yang ditetapkan ?	
O Sangat Tidak Sesuai					
O Tidak Sesuai					
Kurang Sesuai Cukup Sesuai					
O Sesuai					
O Sangat Sesuai					
					Survei Pelayanan Publik pada
					Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2024
					ranun 2024
				6	
RESPONDEN Keterangan Identitas	2 PELAYANAN Jenis Layanan	KUESIONER A Kualitas Pelayanan Publik	4 KUESIONER B. Persepsi Anti Korupsi	5 SARAN & MASUKAN Selesai	
O Macangan activado	O SSIIS MYSIIMI	O / rouses resystem room	D. I disepportationappe		
Silahkan isi kolom dibawah ini					
			76		
46808					
Masukan kode keamanan di ata	t				
Kembali					

2. Hasil Olah Data SKM

				U1	U2		U3		U4	U5	U6	U7	U8	U9	_
No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Saran
1	Revil Alvin	31	Laki-laki	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Dipertahanan dan ditingkatkan kembali
2	Gustia indah prabandasari	32	Perempuan	5	6	6	6	5	5	5	5	6	6	5	Semoga semakin baik ke depannya
3	Ima wahyuni	32	Perempuan	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	6	Pertahankan layanannya sudah bagus dan ramah
4	Fitri Nur Rahmadani	20	Perempuan	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	Mohon pendampingan ke sarana yang langsung di rumah
5	Mardiani	42	Perempuan	6	5	6	5	6	6	5	6	6	6	5	Mampu mempertahankan kualitas pelayanan publiknya
6	Miska khairiah	-	Perempuan	4	5	4	5	5	4	4	6	5	5	5	-
7	Sadah wati	54	Perempuan	6	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	Tidak ada
8	Desi Liyani	34	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	Pelayanan bagus dan sangat memuaskan
9	Ivo leviana winarni	43	Perempuan	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	Pelayanan sangat baik, lebih di tingkatkan lagi untuk pemberitahuan ke masyarakat dan pelaku usaha UMKM
10	JOYO KANIRAN	31	Laki-laki	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Mantap
11	Afri ya nti	48	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	Sesuai lebih enak dalam penyampaian
12	Sutijah	50	Perempuan	5	5	5	5	6	4	5	5	6	5	5	-
13	Muhammad Rahmadi	45	Laki-laki	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Terimakasih untuk layanannya
14	Riri Afrinaldo	43	Laki-laki	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Terimakasih atas informasi yang diberikan
15	Rika	35	Perempuan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Tidak Ada
16	Dina	33	Perempuan	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Terimakasih atas informasinya
17	Era Juwita	36	Perempuan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
18	INSIRA INSANI FITRI	28	Perempuan	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	Bagus, Sopan, Mudah dan tidak ribet
19	Ilhammides yeti, S.H.	44	Laki-laki	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	Baik, layanan mobil keliling terus dilaksanakan
20	Shintia Imelda	37	Perempuan	5	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6	memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan keliling ke pusat kumpul masyarakat sudah baik
21	Ilwani Chichips	45	Perempuan	5	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6	3 produk yang saya produksi ingin lanjut ke BPOM semoga bisa
22	Farisa	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
23	Riris	49	Perempuan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	Tidak ada
24	Marni Elyz	56	Perempuan	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	Tingkatkan pelayanan
25	ANDRES IVENTRI	30	Laki-laki	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	Sudah baik
26	Sipia	33	Perempuan	6	6	5	5	5	6	5	6	6	6	5	tingkatkan lagi

3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

a. Publikasi Hasil SKM



b. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM





c. Absensi

Daftar Hadir Kegiatan Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen 12 Juli 2024 Lokasi : Loka POM di Kabupaten Bungo Waktu : Jumat, 12 Juli 2024 00:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	No TIp	Email	Kehadiran	TTD
1	Anggia Ulfa Pringandari	199509082022032001	Pranata Keuangan Apbn Terampil	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	08988518687	anggia.pringand ari@pom.go.id	Luring - WFO	Just _
2	Anita Triana	199410202019032005	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	085208999526	anita.triana@po m.go.id	Luring - WFO	Special
3	Annisa Alhusna	199504102019032005	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	081273773951	annisaalhusna9 5@gmail.com	Luring - WFO	Home
4	Azmi Auliansyah	199503222019031005	Pranata Komputer Terampil	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Pria	081369000167	azmi.auliansyah @pom.go.id	Luring - WFO	Arrox
5	Bilian Sahiga Jaswatul Ikhsan	199511212019031003	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Pria	082250758623	bilian.sahiga@p om.go.id	Luring - WFO	NA
6	Choirunnisa Ambarwati	199407212019032008	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	081286264087	choirunnisa.am barwati@pom.g o.id	Luring - WFO	Clas
7	Esta Anggih Pratiwi	199408012019032005	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	085600006650	esta.pratiwi@po m.go.id	Dinas	1
8	Likes Dwitus Syarif, S.Si	199408302019032007	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	082373702273	likesdwitus@gm ail.com	Luring - WFO	8
9	M. Arip Franata	198712192019031002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Pria	085266500706	muhammad.fra nata@gmail.co m	Daring - WFO	Pur

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	No TIp	Email	Kehadiran	TTD
10	Nadhirah. S	199111252019032004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	085278295295	nadhirah@pom. go.id	Daring - WFO	A
11	Novia Liza Rahmawaty	199411022019032006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	082213160815	novialr0211@g mail.com	Luring - WFO	Pr
12	Pernanda Sapryanoki	198904012012121001	Kepala Loka Pom Di Kota Sungai Penuh	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Pria	081247770552	nokinanda@gm ail.com	Daring - WFO	April.
13	Ricky Rusli, SH	199210122019031006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Pria	081290790901	riqiemaru12@g mail.com	Daring - WFO	Dely
14	Rischa Mitriani	199301172019032005	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Bungo	Wanita	085265323189	rischa.mitriani@ gmail.com	Luring - WFO	Almin.

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Periode 2023



Loka POM di Kabupaten Bungo Badan Pengawas Obat dan Makanan 2023

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Bungo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Loka POM di Kabupaten Bungo periode 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	89,22	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86,27	
3	Waktu Penyelesaian	92,48	
4	Biaya/Tarif	90,2	
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	91,18	
6	Kompetensi Pelaksana	92,16	
7	Perilaku Pelaksana	96,08	
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,16	
9	Sarana dan Prasarana	88,24	

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

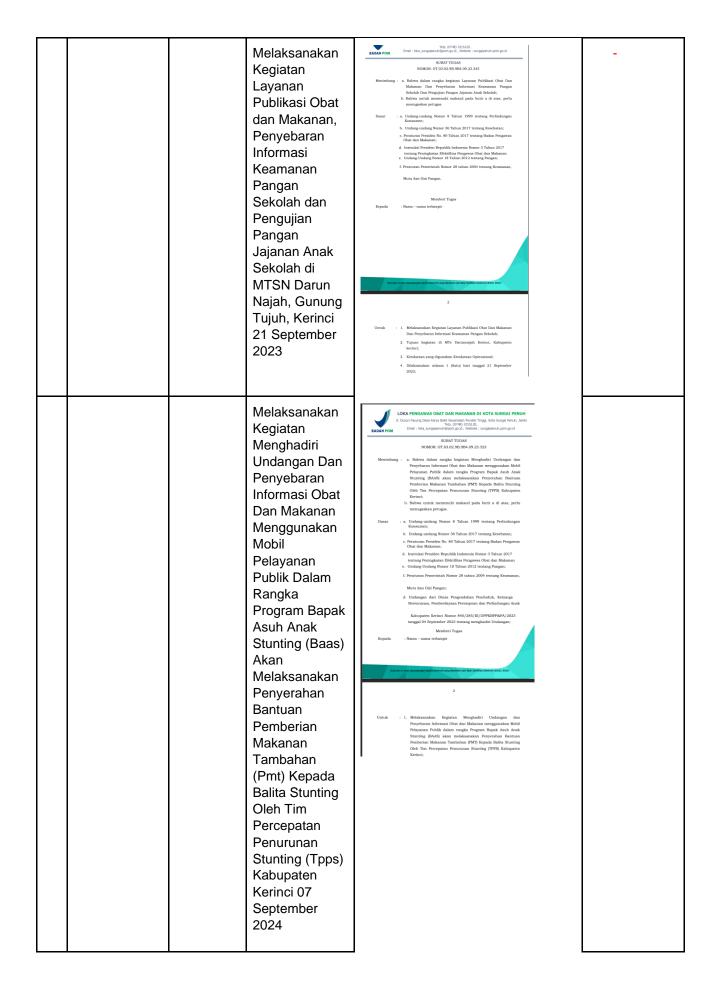
INOL	Prioritas	Program/		Wa	ktu	Penanggung	
	Unsur	Kegiatan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Jawab
1	Unsur 9	Membuat Inovasi pelayanan Publik Aktif Bergerak POM (Pengawas Obat dan Makanan) SAPAKAT (Sapa Masyarakat)			V	V	Infokom

2	Unsur 2	Perbaikan Sistem pemberian dan Penerimaan Pelayanan dan Pengaduan melakukan perbaikan SOP dan Perbaikan tindak Lanjut sampai seluruh pengaduan diselesaikan tepat waktu		>	V	Infokom
3	Unsur 1	Melaksanakan pendampingan UMKM/Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam pemenuhan syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi		V	V	Infokom

BAB III REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindakla njuti (Sudah/Be lum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	Membuat Inovasi pelayanan Publik Aktif Bergerak POM (Pengawas Obat dan Makanan) SAPAKAT (Sapa Masyarakat)	Sudah	Kegiatan Face to Face Obat dan Makanan di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh 10 Juli 2023	CLOAR PERICAMAN GOAT DATA PARACHANA DI KOTA SUNGAI FRUIDH A. DARA Propt Open bere dest text constructive from Topic (see from the Constructive of the Constructive	
			Kegiatan Publikasi Konsultasi terkait Obat dan Makanan Menggunakan Mobil Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh 12-13 September 2023	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH J. Duran Payang Desa Yanya Bala Secamatan Produk Trago, Kota Sunga Penuh, Jambi Pengampan Pengampan, Penuh Jambi Roman Makanan menggamakan Mobil Pelayanan Publik; b. Bahwa dalam rangka kegiatan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan menggamakan Mobil Pelayanan Publik; b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a di atas, perlu menugaskan petugas. Dasar i. a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Resehatan; c. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Resehatan; d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengingkatan Efektifitan Pengawas Obat dan Makanan e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; f. Peraturan Pemerindah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gisi Pangan; Memberi Tugas Kepada i Nama – nama terlampir Unruk i Melakasanakan Kegiatan Layanan Publikasi Konsultasi terkalu Obat dan Makanan menggunakan Mobil Pelayanan Publik; 2. Tujuan kegiatan di Kota Sungai Penuh; 3. Kendaran yang digunakan Kendarann Operasional; 4. Didakanakan selama 2 (Dua) hari tanggal 12-13 September 2023;	-



		Kegiatan LAyanan Publikasi Obat dan Makanan Penyebaran Informasi Keamanan Pangan Sekolah dan Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah du SMP IT 02 Agustus 2023	LOCA PENGAWAS CHAT DAM MACAMAN DI KOTA SURGAI PENDH 3. Donn Prompt Des days half demonate hands Tropy, one longs than Justy Ford I No. Augustermoor part of the Common Pengaman prompt of MIRROT TOWAS MIRROT TOWAS Minimized III. A Minimized Macaman Pengaman Publikani Ohio Dan Minimized Dan Proprisens Informati Kanaman Pangam Minimized Dan Proprisens Informati Kanaman Pangam Minimized Dan Pengaman Jaman Mangama Adalama Ohio Dan Minimized Dan Pengaman Jaman Mangama Palahan Ohio Dan Minimized Dan Pengaman Jaman Mangama Palahan Ohio Dan III. Undang-undang Renor 8 Talama 1917 rentang Pendahangan B. Undang-undang Pengama Pengama Jaman Mangama III. Undang-undang Pengama Jaman Mangama Palahan Oli Tentang Rendahanan III. Undang-undang Pengama Jaman Mangama Pengama Jaman III. Undang-undang Pengama Jaman Mangama Pengama Jaman III. Undang-undang Pengama Jaman Mangama Pengama Jaman Mangama Mangama Jaman Jaman Mendah III. Dan Pengama Jaman Jaman Mendah III. Dan Pengama Jaman Jaman Pengama Pengama Jaman Pengama Jaman	-
2	Perbaikan Sistem pemberian dan Penerimaan Pelayanan dan Pengaduan melakukan perbaikan SOP dan Perbaikan tindak LAnjut sampai seluruh pengaduan diselesaikan tepat waktu	SK Petugas Pelayanan Publik 2023	LOKA PENCAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH 3. Dana Payung Dana Kara Badi Kamanan Panaka Tanga Ida Sargai Panah Teli (1901, 2014) e-mai 1901 angabendigam dalai senderi yang angadi Selata Sungai Penuh KEPALA LOKA PENCAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PERUH NOKOR K. SOJ. SERBAG 97.23.18 PETUHA PENCHANAN PUBLIK LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 - 2028	
		SK LAPAK POM SAPAKAT	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH 3. DIBUR Pepung Desa Gaya Bisi Katunuan Pendak Tinga, Kota Sungai Penuh, Jamos Ting, (1994) 25152520, Tingai Sida, Bungsidenin Digorong Jod, Awades i Bungsipenin Dan Gad KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH MOMENE : HIKAD 2021-10914 (1012-1013) 1014 PENUH MOMENE : HIKAD 2021-10914 (1012-1013) 1014 PENUH PEMILENTIKAN TIM AKSE PERURIAHAN DAKAM LIPWA PERURIKATAN UNIT LAYANAN PENGADUAN KOSSUBANG RUPAS PENGRAM PROGRAM "LAYANAN AKTIF IREGREPAK IRIPMI SAPA MASYARAKAT" (LAPAK POM SAMAKAT) LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	-

3	Melaksanakan pendampingan UMKM/Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam pemenuhan syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi	Pendampingan UMKM Tanggal 21-23 November 2023	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH 3.0 non Percey Des Korn Bild Kennetan Prook. Togi toda Sirqui Penul emal : 1828. sungangen Sulphun 2019. SURAT TUGAS Menimbang : A Bahwa untuk Heretihan dan kedancaran pelaksananan Melaksanakana kepiasan Pendampingan Surana Produksi Pangan Glaban dalam Penersuhan Standar. B. Bahwa untuk menersuhi maksud pada butir a di atas, perlu menugaskan petugas. Dasar a. Undang Undang Si Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Urdang undang Nomor 8 Tahun 1099 tentang Perlunbangan Kessumma. c. Undang undang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kesehatan; d. Peraturan Persiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pergawas Oad dan Makanan e. Undang Undang Si Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Pergawas Oad dan Makanan e. Undang Undang Si Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pungan Memberi Tugas Kepada i. Mana-nama terkampir. Untuk i. 1. Melaksanakan kejatan Pendampingan Sasana Produksi Pangan Glahan dalam Pencerahan Standar; 2. Tujuan kegatana Kota Sungai Peruda 3. Keradaran yang digunakan Kendaraan Pribadi; 4. Dilaksanakan selama 2 (Dua) hari tanggal 21 dan 23	-
		Kegiatan Sertifikasi di Kota Sungai Penuh 12 Oktober 2023	LOKA PENGAWAS GRAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAT PENUH 2. Dann Penuri Dana Goye halo Generatan Penda Teng, Kota Siragi Penuh, Janta Eng, Ciril (1998) 231315. Imali isa, serappen-dilpora good SURAT TUGAS NOMORI PW GA 13 03 9923. (10 23.376 Meninhang : a. balawa dalam rangko menindadanjuti Peningkaian Pengawasan Ohat danjiMakanan Dasar a. Undang-undang El Sensor da bahan 2009 tentang Kosebatan b. Undang-Undang El Nessor 35 Tahun 2009 tentang Kosebatan c. Undang-Undang El Nessor 35 Tahun 2009 tentang Markotika c. Undang-Undang El Nessor 35 Tahun 2009 tentang Moriotika d. Peraturan Penerieriah Nessor 31 Tahun 2009 tentang Pelerjana Kolemanian DIPA Joka POM di Kota Simpai Penuh Tahun 2023 c. MAK GOS, D.I.D.R.1365 BMH ODI. 051.234113 [A] Memberi Tugas Kepada: Nama-nama tentengir. Umtuk 1. Medakhotan Kejistan Per-Audit / Verilikasi Starana Produksi Makanana di Kota Simpai Penuh selama 1 Jeseni hart. 2. Honderson Pribadi: 3. 1 (nest) hart pada tanggal 12 Oktober 2023	
		Pembinaan UMKM di Kabupaten Kerinci 18 Agustus 2024	LOKA PERGANAC GENT DANI JAKABANAN GETORA SURGAL PERUHH BARAM POM SUMM TONG ON THE DESCRIPTION OF THE ACCOUNTY SURGAL PERUHH MONORIO FEW WO GO OF THE GOOD ON THE ACCOUNTY SURGAL PROBLEM Mentinbang: a. babwa dalam eneglas mentindaldanjuri Peningkuran Pragmensen Olei dan Mahaman Dasar a. Undama-undarag El Nemor 50 ushun 2009 tentang berbarian berganas Good of Monor 18 Tahun 2012 tentang berbarian Summan Summan Summan Summan Summan Summan Summan Summan C. Undama Undama Summan Summan Summan Summan Summan Mentinda Summan Sum	-

	Pembinaan UMKM Kota Sungai Penuh 04-05 September 2023	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH 3. Duan Propun Den Kapi Baba Guantean Proces Trop, And Sungai Penuh, James **SURAT TUGAS NOMOS: PW 04.0198.21518. [Smith Use, prepundipprompaid **SURAT TUGAS NOMOS: PW 04.0198.299.203.23.16 Menimbang : a. babun dalam rangka menindakkanjuti Peningkatan Pengawasan Olust dan Makanan Dasar a. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kerapan c. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerapan d. DiPA Loka FOM (Kota Sungai Penuh Tahun 2023 MAK 063.01.DR.3165-QGO.0015.1324113 [8] Memberi Tugas Kepada : Nama-nama terlampir. Untuk : 1. Mehikakan Kegistan Pembinaan UMKM Dalam Ranga Pemeruhan Cara Produksi Pangan Gaban yang Buk (KPON) di Kota Sungai Penuh selama 2 (Bula Jan; 3. Sendaraan Pribadi; 3. Sendaraan Pribadisi.	-
	Pembinaan UMKM di Kota Sungai Penuh 16-17 November 2024	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PERUM 1. Danie Princip Comic Sim Redi Eccusioni Penda Trippi Qui Simpe Pendi, Jurel (2006) SURAT TUGAS NOMOR Princip Color Sim Redi Penda Penda Trippi Qui Simpe Pendi, Jurel Pengawasan Obet den Makanan Dasar a. Undang-undang El Nomor 36 tahun 2009 tentang Reschatanan b. Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Obet den Makanan b. Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawa c. Undang-Undang Ri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Koursipan d. Differ Loka POM 61 Konor 43 Tahun 2009 tentang Koursipan d. Differ Loka POM 61 Konor 018 Tahun 2009 tentang Koursipan d. Differ Loka POM 61 Konor 018 Tahun 2009 tentang Koursipan d. Differ Loka POM 61 Konor 018 Tahun 2009 tentang Koursipan Loka Sungai Pengaman Penda Tahun 2013 MAK 03 J. D. R. B. 165 (200 00. 00 1.524111 (8)) Memberi Tugas Kepada i Numa-enama terlampir. Untuk : 1. Mediadanan Kegiatan Pendananan UMSM Dalam Rangka Penembanan Cora Produksi Inagan Olaham yang Balak (PFOR) di Kabupaten Kerima selama 2 (dau) hari; 2. Kendaran Umum; 3. 2 (dau) bara puda tanggal 16-17 November 2013 Agar yang bersangkutan melakanankan tugas dengan balik dan penuh	-
	Pembinaan UMKM Kabupaten Kerinci 18-22 September 2024	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SUNGAI PENUH 3. Dune Perore Des Kern Both Economic Proofs. Traji tola Serga Penul emat itsa. progeomethion and itselest remetation and serati itsa. progeomethion and itselest remetation and SURAT TUGAS NOMOR: PEN 0-6-01 80 902 09 23.346 Menimbung: a. Bahwa utmik beterithan dan ledancaram pedakannaan Medakansahan kepistan Pemerikasan sarama dalam rangka Pendangingan UMMa sarama produksi makanan dalam Penemuhan standar; b. Bahwa utmik memenahi maksud pada butir a di atas, perlu menugaskan petugas. Dasar a. Undang-Undang Ri Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1099 tentang Perlindungan b Konsumen. c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kesehatan; d. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawa Obat dan Makanan e. Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pangan Memberi Tugas Kepada : Nama-nama terkampir. Untuk : Mama-nama terkampir. 1. Medakanahan kepistan Pemerikaan sarara dalam rangko Pernamingan UMMa sarana produksi makanan dalam Pernesuhan standar; 2. Tujuan kegistan Kabupaten Kerinci	-

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik kesimpulan yaitu, Loka POM di Kabupaten Bungo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)

Bungo,17 Juli 2024 Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo,



Pernanda Saprynoki, S. Farm., Apt